

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Supadi 2006 dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020, p. 101) memberikan catatan bahwa dalam budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang “lebih tinggi” di banding yang dibantu. Pemahaman seperti ini, sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan: oleh karena itu, pemahaman konsep “membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri” harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang setara. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:

- 1) Penyuluh/fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat (Adicondro 1990) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020, p. 101). Maksudnya disini yaitu kehadiran penyuluh/fasilitator bukan sebagai penentu dan pemaksa melainkan ia harus bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakat dan juga mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat serta mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat.
- 2) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya. Pada intinya pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat dan membuat masyarakat berdaya. Oleh sebab itu, maka jangan sampai pemberdayaan menciptakan suatu kegiatan yang nantinya membuat masyarakat sasaran menjadi ketergantungan. Contohnya yaitu pada program yang hanya membagikan/memberikan kebutuhan pokok saja tanpa ada unsur keberlanjutannya seperti apa dan bagaimana nantinya, lalu jika program itu

berhenti maka masyarakat akan kembali pada keadaan sebelumnya dan tidak ada progres sama sekali.

- 3) Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Menurut Subejo Supriyanto (2004) dalam (Bhinadi Ardhito, 2017, p. 23) memaknai Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang. Sedangkan menurut Dwidjowijoto (2007) dalam (Bhinadi Ardhito, 2017, p. 23-24) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Winarni (1998) dalam (Bhinadi Ardhito, 2017, p. 24) mengemukakan pemberdayaan memiliki tiga upaya pokok, diantaranya: Pertama, pengembangan (*enabling*) yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai *input* dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga terciptanya kemandirian, logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi itu berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan seperti program *charity*, pemberdayaan sebaiknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

- 1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- 2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri. (Winarni, 1998) dalam (Bhinadi Ardhito, 2017, p. 25)

Mead (1959) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) mengemukakan bahwa proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui” melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif. Lalu dalam pengertiannya menurut kamus sosiologi dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Maka dari itu, dalam konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003) dalam (Bhinadi Ardhito, 2017, p. 25). Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus

mengikuti pendekatan berikut ini (Sumodiningrat, 2002) dalam (Bhinadi Ardhitto, 2017, p.25):

- 1) Upaya yang harus terarah atau memiliki target, upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuannya.
- 2) Program pemberdayaan masyarakat harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sama artinya dengan pembangunan berbasis pada masyarakatnya (*people centered development*). Dikutip dari buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik karya (Mardikanto & Soebiato, 2020) menyebutkan bahwa inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan. Selain dari itu (Mardikanto & Soebiato, 2020, p. 111–112) dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*)

Dimaksudkan bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Tetapi yang

lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup (*life long learning*).

2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Pada perbaikan ini ada kaitannya dengan perbaikan pendidikan. Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, seta lembaga pemasaran.

3) Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

5) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosialnya, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

8) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Selain dari itu, dikutip dari buku Ekonomi Lingkungan karya (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, p. 42-44) bahwasannya tujuan pemberdayaan dalam masyarakat, memiliki 4 poin utama diantaranya yaitu:

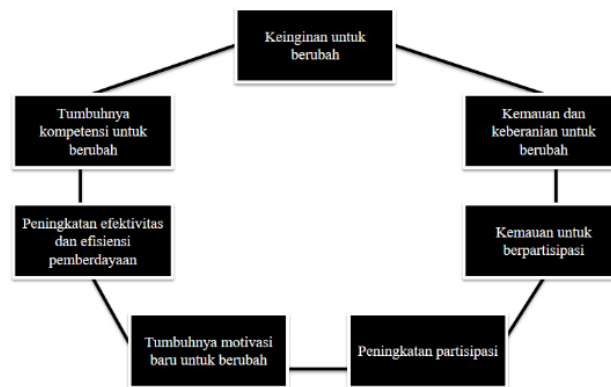
- 1) Untuk pembentukan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada, memperkuat potensi tersebut, dan membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek ekonomi. Pemberdayaan memiliki prinsip kesetaraan yaitu adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program kesetaraan.
- 2) Prinsip partisipasi, yaitu program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- 3) Keswadayaan atau kemandirian, dimaksudkan yaitu untuk mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memfokuskan orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu, harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiel harus dijadikan sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadaanyaannya.
- 4) Berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan

dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang bahkan akhirnya dihapus, dikarenakan masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Menurut Sumaryadi (2005) dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, p. 44) tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membantu mengembangkan masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, dan kaum kecil. Serta pemberdayaan masyarakat juga dapat memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Selain dari itu, tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) Soerjono Soekanto 1987 dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, p. 44). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Selain dari hal tersebut, menurut Payne (2005) dalam (Amri & Ferizko, 2020, p. 228) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh daya dan mengambil keputusan serta menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

2.1.3 Siklus dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Siklus merupakan rangkaian kejadian dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang secara tetap dan teratur. Menurut Wilson (Sumaryadi, 2004) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020, p. 122–123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:



Gambar 2.1 Siklus Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik

- 1) Keinginan untuk berubah, artinya yaitu menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati ataupun partisipasi dari masyarakat.
- 2) Kemauan dan keberanian untuk berubah, artinya yaitu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil sebuah keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- 3) Kemauan untuk berpartisipasi, artinya yaitu mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan partisipasi, artinya yaitu upaya meningkatkan peran partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya.
- 5) Tumbuhnya motivasi baru untuk berubah, artinya yaitu peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditujukan adanya perkembangan melalui motivasi-motivasi untuk melakukan suatu perubahan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan.
- 7) Tumbuhnya kompetensi untuk berubah, artinya yaitu peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan.

Martinez (1985) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) mengemukakan bahwa pembangunan (pedesaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya

kesempatan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial and error*” melainkan akibat dari perencanaan yang baik. Oleh karena itu perlu untuk diingat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan perkataan lain, pemberdayaan masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya. Menurut Venugopal (1957) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) perencanaan program merupakan suatu prosedur kerja bersama-sama dengan masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerima manfaat yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Mueller (Dahama dan Bhatnagar, 1980) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) perencanaan program yaitu sebagai upaya sadar yang dirancang atau dirumuskan guna tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) masyarakat untuk siapa program tersebut ditujukan. Maka dari itu, program pemberdayaan masyarakat layaknya harus memiliki perencanaan/tahapan yang teratur dan terkonsep.

Tim Delivery (2004) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020, p. 125–127) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu dimulai dari proses seleksi lokasi/wilayah sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Pemilihan lokasi hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi dapat menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat). Dalam program pemberdayaan masyarakat, fasilitator hendaknya harus

bisa menciptakan iklim yang dialogis, bisa mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu tentang tujuan, strategi, alternatif, dan lain sebagainya sehingga nantinya bisa dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisai.

3) Proses pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Proses identifikasi ini meliputi; (1) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, (2) persiapan penyelenggaraan pertemuan, (3) pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, serta (4) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, dimaksudkan yaitu untuk membentuk suatu kelompok dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil kajian dalam menyusun rencana kegiatan kelompok ini meliputi; (1) memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah yang ada, (2) identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik, (3) identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah, dan (4) pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya. Jadi, dalam menyusun rencana kegiatan kelompok dari apa yang ada di masyarakat perlu untuk dikembangkan, diperbaiki, dan diberi inovasi baru.
- c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok, yaitu suatu rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping, selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata atau konkret dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah

pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

- d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory, monitoring, and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikannya jika diperlukan.
- 4) Pemandirian masyarakat, yaitu berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim fasilitator pada awal proses pemberdayaan peranannya sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai ketika masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Lalu kapan waktu pemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan masyarakat.

Sedangkan menurut Soekanto dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, p. 49-

51) tahapan pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan adalah:

- 1) Tahapan persiapan, pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas yang berupa tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif (pendekatan tidak langsung).
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*), pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas/tim pengabdian mengidentifikasi masalah

kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat yang menjadi sasaran.

- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini penyelenggara sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap pemfomalisasi rencana aksi, pada tahapan ini penyelenggara membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga penyelenggara membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar penyelenggara dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- 6) Tahap evaluasi, evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan penyelenggara program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Tahap terminasi, merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Selain dari itu, Kartasmita (1997) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) mengemukakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat

telah berhasil, maka perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dapat dibandingkan. Maka dari itu, dalam program pemberdayaan masyarakat haruslah adanya pelaksanaan monitoring. Menurut WHO dalam (Jaya et al., 2018, p. 23) monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk memeriksa secara reguler untuk melihat apakah kegiatan (program) tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang ditemui dapat diatasi.

2.1.4 Indikator Keberdayaan

Dikutip dari buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik karya (Mardikanto & Soebiato, 2020) mengemukakan bahwa di dalam program pemberdayaan masyarakat harus ditentukan oleh masyarakat, yang di mana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini agar dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan. Selain itu (Mardikanto & Soebiato, 2020) mengemukakan bahwa dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan serta melestarikan sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional. Maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2004) dalam (Suharto, 2017, p. 63). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu; kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Berikut merupakan tabel dari indikator keberdayaan.

Tabel 2.1 Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p>Kekuasaan di dalam (<i>power within</i>): Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.</p>	<p>1) Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. 2) Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. 3) Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat.</p>	<p>1) Kepercayaan diri dan kebahagiaan. 2) Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. 3) Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain. 4) Keinginan untuk mengontrol jumlah anak.</p>	<p>1) <i>Assertiveness</i> dan otonomi. 2) Keinginan untuk menghadapi subordinas gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik. 3) Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik.</p>
<p>Kekuasaan untuk (<i>power to</i>): Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.</p>	<p>1) Akses terhadap pelayanan keuangan mikro. 2) Akses terhadap pendapatan.</p>	<p>1) Keterampilan, termasuk kemelekan huruf. 2) Status kesehatan dan gizi.</p>	<p>1) Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah.</p>

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
	3) Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. 4) Akses terhadap pasar. 5) Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak.	3) Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. 4) Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik.	2) Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan. 3) Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan.
Kekuasaan atas (<i>power over</i>): Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.	1) Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. 2) Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya.	1) Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana.	1) Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat.

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
	3) Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. 4) Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. 5) Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar.	2) Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.	2) Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.
Kekuasaan dengan (<i>power with</i>): Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.	1) Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern. 2) Mampu memberi gaji terhadap orang lain.	1) Penghargaan tinggi terhadap peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. 2) Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.	1) Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. 2) Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
	3) Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.		3) Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

2.1.5 Program Raksa Desa

Menurut Feuerstein (1990:209) dalam (Wulandari, 2021, p. 23) program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu. Selanjutnya, Suherman dan Sukjaya (1990:24) dalam (Wulandari, 2021, p. 23) mengemukakan program sebagai suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Lalu menurut Arikunto dan Jabar, 2009:4 dalam (Wulandari, 2021, p. 23) program didefinisikan sebagai suatu unit kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Terdapat unsur penting dalam suatu program yaitu:

- 1) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- 2) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- 3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, maka dapat dimaknai bahwa program adalah suatu rancangan kegiatan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan berbagai faktor yang nantinya bisa mendukung pelaksanaan dan pencapaian program. Biasanya prosesnya berkelanjutan dan melibatkan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Salah satu contoh dari organisasi tersebut yaitu organisasi kemasyarakatan, dari definisinya organisasi masyarakat adalah suatu wadah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi masyarakat yang berkembang pada dewasa ini khususnya yang berada di Kota Tasikmalaya salah satunya adalah Yayasan Rumah Harapan Kita.

Yayasan Rumah Harapan Kita atau biasa disebut dengan RHK adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, fokus dari yayasan ini yaitu pada pengembangan masyarakat dan pemberian perlindungan sosial bagi kelompok rentan dengan berorientasi pada dampak sebagai tujuan utama program

sosial yang dicanangkan. Dalam memandang fenomena sosial, yayasan Rumah Harapan Kita ini berfokus pada pemanfaatan potensi kesejahteraan sosial selain daripada penanganan masalah sosial secara langsung. Selain dari hal tersebut, Yayasan Rumah Harapan Kita hadir sebagai *holding foundation* dari berbagai macam lembaga pemberi pelayanan kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok rentan serta penggerak kepedulian masyarakat di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Fokus dari yayasan ini yaitu untuk mengembangkan masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Salah satu bidang garapan yang ada di Yayasan Rumah Harapan Kita yaitu program *Social Innovation Academy (Simy)* lalu dalam tahapannya program *Simy* ini melaksanakan tahapan *education movers (edu movers)*, *lab movers*, dan *social impact*. Dilihat dari tahapan tersebut, maka untuk program Raksa Desa termasuk kedalam tahap *social impact* yang di mana program tersebut dimaksudkan yaitu berupa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh para pemuda sebagai motor penggerak sekaligus pelaksana agar nantinya dapat memberikan dampak secara sosial. Para pemuda/pelaksana disini yaitu terdiri dari anggota yang mengikuti program *Social Innovation Academy (Simy)* dan *volunteer* yang terkumpul dari hasil *open recruitment*. Adapun yang menjadi bidang garapan dalam program ini yaitu meliputi tiga bidang, diantaranya; (1) bidang pemberdayaan pemuda membuat program Seminar Bisnis Model Canvas (BMC) dan Pelatihan Pembuatan Paket Wisata (P3W), (2) bidang kesehatan lingkungan membuat program Edukasi, Biopori, dan Reboisasi (Ekariasi), (3) bidang pendidikan membuat program Konsolidasi, Edukasi, Sosialisasi Kampung Pasir Sereh (Konduksi PS) serta menyelenggarakan program PKBM Kejar paket A, B, dan C yang bermitra dengan PKBM Annur. Selain dari itu, adapun program penyaluran masyarakat bagi yang memiliki keinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan dengan berkuliah di Universitas Terbuka. Lalu untuk sasaran dalam program ini yaitu masyarakat Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

2.1.6 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan (Rahman, 2018, p. 18).

Menurut Friedlander dalam (Suminartini & Susilawati, 2020, p. 229) pengertian kesejahteraan masyarakat (sosial) yaitu suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang di maksudkan untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Husna, 2014, p. 47) kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Bab I Ketentuan Umum pasal 2 ayat 2, menyebutkan bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial artinya yaitu semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sedangkan

menurut Todara dan Stephen C. Smith dalam (Listyaningsih Erna & Apip Alansori, 2020, p. 49-50) menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara materiel, duniawi, dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

- 1) Tingkat kebutuhan dasar, yaitu adanya peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- 2) Tingkat kehidupan, yang terdiri dari peningkatan tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan pendidikan.
- 3) Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa, yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kehidupan manusia memiliki beragam kebutuhan yang mesti dipenuhi agar mereka dapat hidup fungsional/memiliki kehidupan yang memuaskan. Kebutuhan-kebutuhan itu terdiri dari tempat tinggal, perawatan kesehatan, keamanan, kesempatan untuk tumbuh kembang secara emosional dan intelektual, hubungan dengan lainnya, dan pemenuhan kebutuhan spiritual. Biasanya, beberapa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui sumber-sumber personal, atau dalam keluarga dan jaringan pertemanan. Tetapi ketika sumber-sumber tersebut tidak sesuai (tidak diperoleh), kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui mekanisme kemasyarakatan. Sistem kesejahteraan sosial adalah mekanisme pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut (Wibhawa et al., 2015, p. 37–38). Dalam masyarakat kontemporer mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Personal: diri sendiri, keluarga, teman, dan kolega kerja.
- 2) Informal: penolong alami dalam masyarakat, kelompok kemandirian (*self-help groups*), kelompok masyarakat arus bawah (*community grass-root groups*), klub, dan kelompok lainnya yang berfungsi secara informal.
- 3) Institusional: sekolah, rumah sakit, dan organisasi formal lainnya.
- 4) Kemasyarakatan: pelayanan, badan-badan, dan lembaga-lembaga yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat tertentu.

2.1.7 Fungsi dan Komponen Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat/sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fahrudin (2012:12) dalam (Haryanto, 2019, p. 134–135) fungsi-fungsi dari kesejahteraan masyarakat/sosial terdiri dari empat fungsi, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3) Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Dalam kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari adanya komponen. Komponen ini dapat diartikan yaitu sebagai bagian dari unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan dan saling berhubungan sehingga nantinya dapat berjalan. Komponen dalam kesejahteraan masyarakat ini juga dapat menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan masyarakat/sosial dengan kegiatan lainnya. Berikut

merupakan komponen-komponen dalam kesejahteraan masyarakat/sosial menurut Fahrudin (2012:16) dalam (Haryanto, 2019, p. 139–140):

1) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

3) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode serta teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya. Kebijakan pelayanana kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh proses pelayana dan pengakhiran pelayanan.

5) Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

6) Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.1.8 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sukirno (2012) dalam (Listyaningsih Erna & Apip Alansori, 2020, p. 51) kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Dalam mengukur tercapai tidaknya pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Listyaningsih Erna & Apip Alansori, 2020, p. 52-53) indikator dari kesejahteraan masyarakat yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (1 tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan dividen), serta tunjangan dari pemerintah.

2) Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, di mana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan lokasi geografis.

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya. Dengan demikian, pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- 1) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Atika Putri, 2021) dengan judul “Peran Aksi Cepat Tanggap dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medan Belawan”. Dapat disimpulkan bahwa peran yang dilaksanakan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu melalui berbagai program kerjanya, beberapa program kerja ini meliputi aspek pemenuhan kebutuhan pokok, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan masyarakat. Peran lembaga Aksi Cepat Tanggap Kantor Cabang Sumatera Utara ini bisa dikatakan sudah cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Medan Belawan. Karena, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar bagi manusia, dan dilihat dari program-program yang dijalankan sudah memenuhi standar kesejahteraan. Peran lembaga Aksi Cepat Tanggap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan juga sangat efektif karena lembaga Aksi Cepat Tanggap selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga mengetahui nilai keberhasilan kegiatan tersebut.
- 2) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Nanda Vinandita Maghriza Pries Dayanti, 2021) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar”. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui paguyuban jajanan pasar Sari Roso memberikan pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ploso yang ditinjau dari segi ekonomi. Dikarenakan masyarakat Desa Ploso sudah bisa dikatakan sejahtera sesuai dengan indikator kesejahteraan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi indikator, yaitu: kebutuhan dasar merupakan terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, agama, kesehatan, dan

kependidikan. Dalam hal ini setelah adanya paguyuban Sari Roso tingkat pendapatan warga Desa Ploso khususnya para anggota paguyuban dapat meningkat, kebutuhan sehari-hari mereka dapat tercukupi, dan hasil dari paguyuban dapat memberikan pendidikan untuk anak, keadaan rumah yang layak, serta dengan hasil dari paguyuban bisa memenuhi kebutuhan kesehatan untuk keluarga. Berdasarkan tahapan kesejahteraan menurut BKKBN, kesejahteraan anggota paguyuban Sari Roso dapat dikatakan meningkat pada tahap keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus.

- 3) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Muhammad Bahrus Syafi'i, 2022) dengan judul "Pemberdayaan Kelompok Tani Mureh Hasil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sayur di Desa Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberdayaan kelompok tani Mureh Hasil ini sudah berjalan cukup baik dengan beberapa programnya yaitu pemberian pupuk subsidi dari pemerintah, traktor bersama, dan pemberian bibit kepada para petani. Kesejahteraan petani dapat dilihat baik dari kebutuhan sehari-hari yang sudah terpenuhi, pendapatan yang meningkat, dan dapat mencukupi kebutuhan diluar kebutuhan primer keluarga. Selain dari itu, dengan adanya kelompok tani Mureh Hasil para petani di Desa Kauman tidak kesulitan dalam hal pemasaran karena salah satu anggota kelompok tani Mureh Hasil ada yang menjadi pengepul dari hasil panen para petani sayur.
- 4) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Suminartini & Susilawati, 2020) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat melalui Bidang Usaha *Home Industry* dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Dapat disimpulkan yaitu usaha *home industry* berupa kerudung ini memiliki banyak manfaat yang tadinya hanya untuk menjadi sumber penghasilan bagi pemilik usaha tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat membantu masyarakat di sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan memberdayakannya dengan keterampilan yang diberikan dalam pembuatan kerudung terutama untuk ibu-ibu rumah tangga.

5) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Gian Rabbani et al., 2021) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi melalui Program Kelompok Mingguan (PKKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Dapat disimpulkan bahwa program PKKM merupakan program pemberdayaan ekonomi yang tidak terfokus pada penguatan dana saja melainkan dalam menguatkan SDM. Dalam pelaksanaan PKKM ini, masyarakat di tuntut untuk aktif berpartisipasi dan juga terlibat. Hal tersebut bertujuan agar kedepannya masyarakat yang menjadi sasaran dapat mampu hidup mandiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Hasil yang di capai dalam PKKM yang telah dilaksanakan oleh PT BPR Parashabat ini diantaranya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menjadi mandiri dalam memecahkan setiap masalahnya yang didukung oleh motivasi dan latihan wajib kumpul yang pernah dilaksanakan sebelum melakukan pinjaman sedangkan dalam tercapainya kesejahteraan hal tersebut didukung oleh pelatihan, pinjaman atau penguatan modal serta beasiswa, dan terakhir adalah memberikan latihan terhadap nasabah (masyarakat sasaran) untuk menabung.

2.3 Kerangka Konseptual

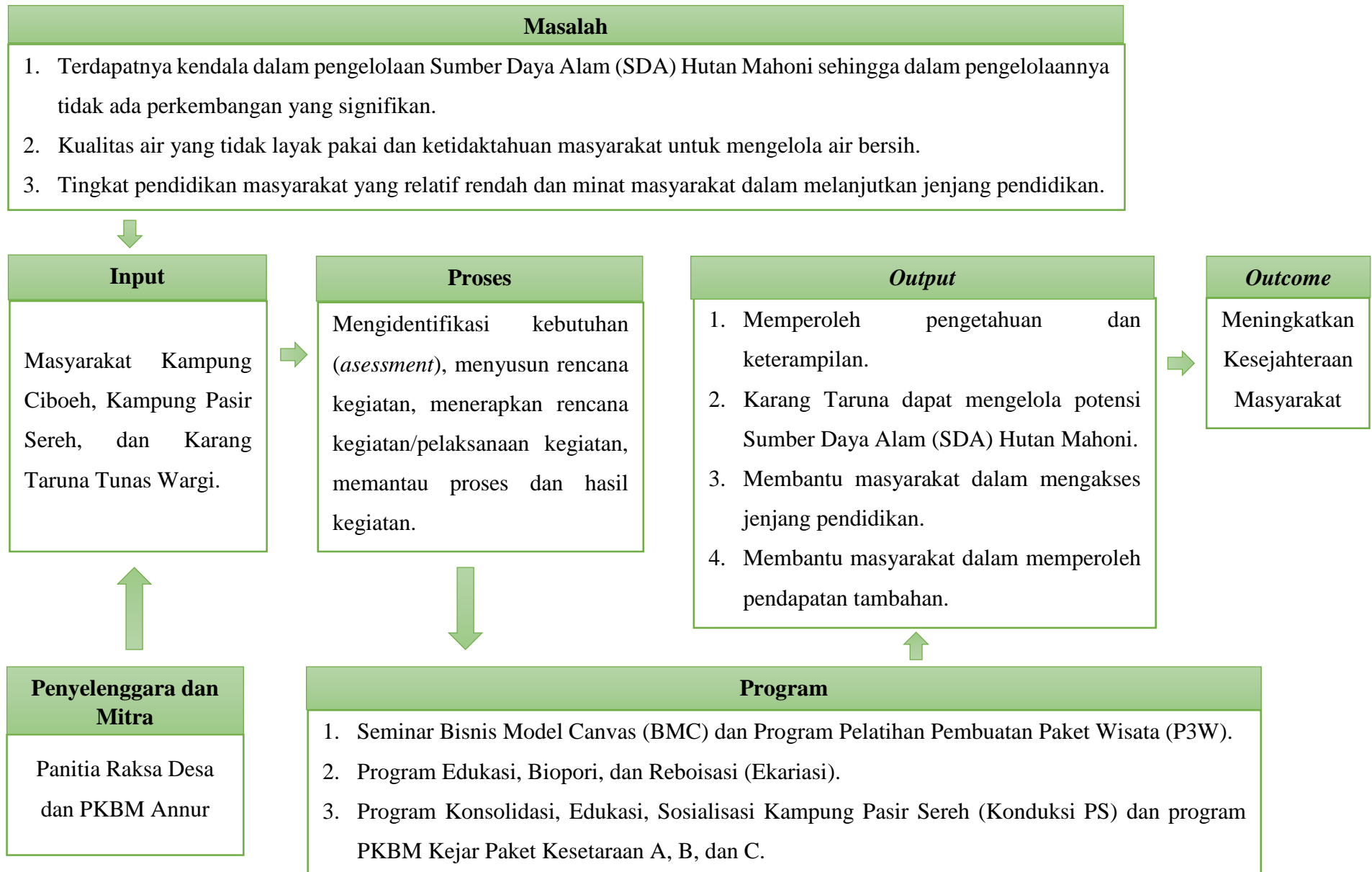
Adanya potensi dan sumber daya yang belum tergali mengakibatkan masyarakat belum bisa memberikan dampak yang baik dan bermanfaat secara signifikan baik itu untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Selain dari hal tersebut, munculnya beragam masalah sosial yang ada dan harus dihadapi oleh individu atau masyarakat menyebabkan kebutuhan akan pemberdayaan sangat di perlukan.

Berbagai permasalahan yang ada di Kelurahan Setiawargi ini sangat beragam mulai dari remaja hingga orang tua. Permasalahan yang muncul tersebut yaitu diantaranya Kelurahan Setiawargi merupakan wilayah tertinggal yang ada di Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari segi rumah warga yang ada disana mayoritas masih menggunakan rumah panggung ditambah aksesibilitas wilayahnya cukup jauh dengan pusat kota dan akses jalannyapun kurang bagus serta didukung juga dengan Kelurahan Setiawargi merupakan kelurahan terbesar kedua yang berada di Kecamatan Tamansari sehingga dari segi pembangunannya masih terdapat

kesenjangan. Disamping hal tersebut, dilansir dari profil kelurahan yang telah didapatkan. Pada tahun 2022 tingkat kesejahteraan keluarga yang ada di daerah Kelurahan Setiawangi mayoritas berstatus Keluarga Prasejahtera dengan jumlah 2537 KK Prasejahtera.

Selain dari hal tersebut, para pemuda khususnya karang taruna belum bisa memaksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hutan Mahoni sehingga dalam pengelolaannya tidak ada perkembangan yang signifikan. Lalu masih minimnya air bersih dan didukung dengan ketidaktahuan masyarakat untuk mengelola air bersih akhirnya masyarakat seringkali abai dengan dampak kesehatan yang timbul akibat kualitas air yang buruk tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakatnya relatif rendah dengan rata-rata masyarakat disana berhenti pada jenjang SD/SMP dan pada jenjang SMPpun masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan sekolahnya sampai selesai sehingga mengakibatkan rata-rata masyarakat disana sudah mulai bekerja, otomatis berpengaruh pada mata pencaharian dan penghasilannya. Di mana mayoritas mata pencaharian masyarakat disana yaitu bertani dan berkebun. Oleh sebab itu, maka diperlukannya program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Program Raksa Desa merupakan salah satu contoh dari program pemberdayaan masyarakat yang di mana dimaksudkan yaitu berupa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh para pemuda sebagai motor penggerak sekaligus pelaksana agar nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berdaya. Fokus dari bidang garapan yang diangkat dalam program Raksa Desa ini yaitu memuat tiga bidang, diantaranya; bidang pemberdayaan pemuda membuat program Seminar Bisnis Model Canvas (BMC) dan Program Pelatihan Pembuatan Paket Wisata (P3W), bidang kesehatan lingkungan membuat program Edukasi, Biopori, dan Reboisasi (Ekariasi), lalu bidang pendidikan membuat program Konsolidasi, Edukasi, Sosialisasi Kampung Pasir Sereh (Konduksi PS) dan program PKBM Kejar paket kesetaraan A, B, C yang bekerja sama dengan PKBM Annur. *Output* yang diharapkan dari program ini yaitu dapat memberdayakan serta membantu masyarakat dalam memperoleh akses kesejahteraan.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program Raksa Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
- 2) Bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program Raksa Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?